

BAB II

KAJIAN LITERATUR

Dalam Tugas Akhir mengenai Analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru ini akan digunakan beberapa teori yang sesuai sebagai dasar pemahaman dalam penelitian ini.

2.1 Fasilitas Sosial

2.1.1 Peran Fasilitas Sosial

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dinilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu untuk pemenuhan kebutuhan tertentu. Dalam pengertian lain jika dikaitkan dengan permukiman, pengertian fasilitas adalah suatu aktivitas atau materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu atau kelompok individu dalam suatu lingkungan kehidupan. Secara sistematis, aktivitas atau materi tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok utama yaitu fasilitas fisik dan fasilitas sosial. Meskipun berbeda, namun kedua fasilitas tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Fasilitas sosial dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang bersifat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual, yang antara lain terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, fasilitas perbelanjaan, fasilitas pemerintahan serta fasilitas permakaman (Burdah, 2006 dalam Henlita 2013). Fasilitas sosial merupakan bagian yang sangat penting yang sangat dibutuhkan dalam setiap lingkungan permukiman yang baik. Sedangkan fasilitas fisik dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang bersifat fisik dan mencakup utilitas umum. Fasilitas sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Peran sarana dan prasarana dalam pembangunan suatu wilayah yaitu sebagai pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Kodoatie, 2005).

Pada masing-masing teori terdapat beberapa persamaan pandangan mengenai peran fasilitas sosial yaitu suatu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial. Berdasarkan pendapat di atas mengenai peran fasilitas sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat di simpulkan bahwa peran fasilitas sosial adalah ketersediaan sarana perkotaan yang memenuhi kebutuhan dasar aktivitas manusia. Namun, peran fasilitas

sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan saja tetapi juga dapat memberikan kepuasan mental dan spiritual akan pemanfaatan sarana perkotaan. Dalam penelitian ini fokus pada optimalisasi persebaran fasilitas sosial berupa sarana pendidikan SMP/MTs guna memenuhi kebutuhan wilayah untuk memperoleh pelayanan publik. Oleh karena itu, dengan melihat pada permasalahan yang berada di wilayah studi, indikator yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan ini merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Fasilitas Sosial

Keberadaan fasilitas sosial memberi pengaruh pada seberapa jauh suatu wilayah telah menjalankan fungsinya. Menurut Tarigan (2005), pada dasarnya suatu wilayah dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya apabila tersedia berbagai jenis fasilitas perkotaan, salah satunya keberadaan pusat penyediaan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dll) yang didukung oleh peran infrastruktur sebagai aksesibilitas. Kebutuhan fasilitas sosial disuatu wilayah dipengaruhi oleh kebutuhan dari penduduk perkotaan itu sendiri. Kebutuhan fasilitas sosial di perkotaan dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk, status sosial ekonomi, nilai-nilai kebudayaan dan antropologi (Sujarto, 2001).

Pada dasarnya pengadaan kebutuhan infrastruktur berupa fasilitas sosial merupakan hasil kekuatan penawaran pemerintah dan permintaan penduduk perkotaan ditambah dari kebijakan publik (Canning, 1998 dalam Henlita 2013). Kebijakan publik merupakan faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kebutuhan penduduk dan penggunaan lahan eksisting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Kodoatie, 2005). Namun, dengan memandang dari sudut pandang karakteristik penduduk dan kebijakan publik pada wilayah tersebut dalam memandang kebutuhan fasilitas sosial. Keberadaan fasilitas sosial dianggap optimal ketika terdapat minat atau keinginan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Minat dan kesediaan penduduk dalam suatu wilayah dalam memanfaatkan fasilitas sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas tersebut, karena pada dasarnya penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan fasilitas sosial (Tarigan, 2005).

Pada dasarnya faktor umum dari fasilitas sosial yaitu suatu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan penyediaan sarana dan prasarana kota. Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat diketahui

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan fasilitas sosial antara lain adalah karakteristik penduduk, ketersediaan aksesibilitas dan kriteria kebijakan. Kebijakan publik memiliki peranan dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas sosial. Penelitian ini fokus pada optimalisasi persebaran fasilitas sosial berupa pendidikan SMP/MTs guna memenuhi kebutuhan wilayah untuk memperoleh pelayanan publik. Oleh karena itu, dengan melihat pada permasalahan yang berada di wilayah penelitian, indikator yang didapat dari hasil kajian diatas adalah karakteristik penduduk (jumlah penduduk menurut usia sekolah), ketersediaan aksesibilitas dan kriteria kebijakan yang terkait dengan perencanaan fasilitas sosial di wilayah studi.

2.2 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu dari jenis fasilitas sosial yang memiliki kedudukan dalam infrastruktur sosial. Fasilitas pendidikan tergolong infrastruktur sosial dikarenakan fasilitas pendidikan merupakan bangunan tempat pendukung yang menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial agar sistem sosial dalam masyarakat berfungsi. Pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menumbuhkan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas Th 2003). Fasilitas pendidikan berarti aktivitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental maupun spiritual melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, maupun pelatihan. Melalui pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman-pengalaman kolektif yang akan mempertemukan berbagai kelompok penduduk. Mempertemukan disini tidak hanya sekedar menyediakan sarana untuk kelompok penduduk, tetapi juga mengurangi perbedaan dalam perkembangan pengetahuan. Dalam kaitannya dengan latar belakang penduduk yang semakin meningkat maka penyediaan fasilitas pendidikan ini harus dapat atau mampu menjawab kebutuhan dari masyarakat tersebut. Terdapat 4 jenis fasilitas pendidikan yaitu :

1. TK → merupakan fasilitas pendidikan paling dasar untuk anak-anak usia 5-6 tahun
2. SD → merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia 6-12 tahun
3. SMP → merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi melayani anak-anak lulusan Sekolah Dasar (SD) usia 13-15 tahun.

4. SMA → merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi melayani anak-anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) usia 16-18 tahun.

Berdasarkan pendapat diatas, maka fasilitas pendidikan merupakan media pendukung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial yang dapat dikatakan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian ini fokus pada optimalisasi persebaran fasilitas pendidikan formal yaitu fasilitas pendidikan SMP/MTs . Indikator dari kajian fasilitas pendidikan jenjang SMP/MTs adalah keberadaan fasilitas sosial disuatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor kebutuhan peserta didik yaitu penduduk usia 13-15 tahun, faktor daya tampung dan faktor pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penduduknya.

2.3 Kebutuhan Sarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pelayanan merupakan fungsi dari penduduk sebagai obyek pelayanan. Perkembangan fasilitas akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan dinamika perkembangan sosial ekonominya (Muta'ali, 2015). Bertambahnya jumlah penduduk membawa implikasi bagi meningkatnya tuntutan dan kebutuhan akan fasilitas yang mendukung kehidupannya. Asumsi dasarnya adalah semakin meningkat jumlah penduduk maka kebutuhan fasilitas penduduk juga akan meningkat. Dalam perencanaannya, penyediaan fasilitas pelayanan salah satunya adalah analisis tingkat ketercukupan akan fasilitas yang tersedia. Dimana dalam perhitungannya dibutuhkan data-data standar normatif atau SPM kebutuhan fasilitas sebagai pembanding baik yang sifatnya ambang batas pelayanan, maupun luasan ruang minimal fasilitas sehingga dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan fasilitas pelayanan.

Evaluasi tingkat ketercukupan fasilitas pendidikan di tentukan dengan membandingkan ketersediaan fasilitas yang ada dengan kebutuhan fasilitas yang dihitung dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Tingkat ketercukupan fasilitas pelayanan juga seringkali disebut dengan daya dukung fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang ada (Muta'ali, 2015). Berikut merupakan rumus menghitung daya dukung fasilitas :

$$DDfi = Si / Di \quad \text{dimana} \quad Di = JP / Thi$$

Sumber : Muta'ali, 2015

Keterangan :

Ddfi : Daya Dukung Fasilitas i

Si : Ketersediaan Fasilitas i

Di : Kebutuhan Fasilitas i

JP : Jumlah Penduduk

Thi : Ambang Batas Fasilitas i

Berdasarkan formulasi tersebut diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. $Ddfi = 1$, artinya $Di = Si$, yaitu terjadi keseimbangan fungsi pelayanan fasilitas antara kebutuhan penduduk dengan keberadaan fasilitas yang ada (eksisting). Nilai $Ddfi = 1$ dapat ditafsirkan tingkat pelayanan efisien.
2. $Ddfi > 1$, artinya $Di > Si$, maka keberadaan fasilitas yang ada telah mampu mendukung kebutuhan penduduk. Nilai $Ddfi > 1$ dapat ditafsirkan tingkat pelayanan mencukupi (surplus). Namun jika nilai kelebihan terlalu besar maka terjadi kondisi yang tidak efisien karena banyak fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh penduduk atau pemanfaatannya masih dibawah standar pelayanan minimum.
3. $Ddfi < 1$, artinya $Di < Si$, maka keberadaan fasilitas yang ada tidak mampu mendukung kebutuhan penduduk atau terjadi kekurangan (defisit) fasilitas sehingga diperlukan jumlah tambahan fasilitas. Nilai $Ddfi < 1$ dapat ditafsirkan tingkat pelayanan tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan jumlah tambahan kebutuhan fasilitas yang dapat dihitung dengan mengurangi ketersediaan dengan kebutuhan fasilitas.

$$\text{Tambahan Kebutuhan Fasilitas} = Di - Si$$

Sumber : Muta'ali, 2015

Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk fasilitas pendidikan diatur dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan sebagai berikut :

TABEL II. 1
Kriteria Penentuan Pelayanan Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (Jiwa)	Standar (m ² /jiwa)	Kebutuhan persatuan sarana		Keterangan
				Radius pencapaian	Lokasi dan penyelesaian	
1	TK	1.250	0,28	500	Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	Dapat bersatu dengan sarana lain.
2	SD	1.600	1,25	1.000		Dapat bergabung dengan sarana pendidikan lain.
3	SLTP	4.800	1,88	1.000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	
4	SMU	4.800	2,6	3.000		
5	Taman Bacaan	2.500	0,09	1.000	Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan lingkungan	

Sumber : SNI 03-1733-2004

Berdasarkan Tabel II.1, jenis sarana pendidikan berupa SLTP memiliki ketentuan pelayanan minimum dengan jumlah penduduk sebanyak 4.800 jiwa. Artinya satu fasilitas SLTP idealnya mampu melayani penduduk sebanyak 4.800 jiwa. Selain jumlah penduduk, fasilitas SLTP juga memiliki standar radius pencapaian sejauh 1.000 meter dengan lokasi dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olahraga dan tidak selalu harus di pusat lingkungan.

2.4 Daya Tampung Sekolah

Visi pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Landasan Sistem Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pada sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan terampil yang diikuti dengan ras percaya diri serta sikap dan perilaku inovatif. Disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup didalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kaitan dalam penelitian ini, pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan secara fisik berupa sarana pendidikan yang dilihat berdasarkan partisipasi pendidikan serta ketersediaan rombongan belajar dan jumlah rasio siswa per rombongan belajar (Widianantari, 2008).

2.4.1 Partisipasi Pendidikan

Masalah partisipasi pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan pendidikan, baik disekolah maupun diluar sekolah dengan jumlah penduduk yang secara potensial sudah siap memasuki satuan-satuan pendidikan. Semakin tinggi angka kesenjangan antara jumlah penduduk yang menjadi peserta didik dengan jumlah penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan, maka semakin besar pula masalah partisipasi sekolah. Berdasarkan pernyataan diatas maka angka partisipasi pendidikan dapat berpengaruh terhadap kapasitas daya tampung sekolah. Angka partisipasi pendidikan di bedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa seluruhnya (di jenjang pendidikan tertentu) dengan jumlah penduduk usia sekolah. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK juga digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperluas kesempatan bagi penduduk mengenyam pendidikan. Dimana indikator keberhasilan tersebut juga digunakan untuk melihat seberapa besar daya tampung sekolah yang dapat menampung jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Nilai APK bisa melebihi 100% dikarenakan populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Berikut merupakan rumus untuk mengitung APK .

$$APK = \frac{\text{Jumlah Siswa Seluruhnya}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100$$

Sumber : Husaini 2006 dalam Widianantari 2008

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa usia tertentu (di jenjang pendidikan tertentu) yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang bersangguran. Indikator APM digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk lebih spesifik pada suatu tingkat pendidikan. APM juga digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur daya serap fasilitas pendidikan yang tersedia terhadap jumlah penduduk apakah sudah digunakan secara optimal oleh kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut. Dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai indikator tingkat keberhasilan suatu program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperluas kesempatan bagi penduduk mengenyam pendidikan dan melihat seberapa besar daya tampung sekolah yang dapat menampung jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu wilayah. Sebagai gambaran misalnya APM SMP adalah proporsi jumlah murid SMP yang berusia 13-15 Tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 Tahun pada suatu daerah tertentu. Berikut merupakan rumus untuk menghitung APM.

$$APM = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia Sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100$$

Sumber : Husaini 2006 dalam Widianantari 2008

2.4.2 Kriteria Daya Tampung Fasilitas Pendidikan

Daya tampung (kapasitas) sekolah adalah banyaknya siswa yang dapat tertampung dalam suatu sekolah. Daya tampung sekolah dilihat dari banyaknya calon siswa yang dapat diterima menjadi siswa dengan mempertimbangkan fasilitas dan daya dukung yang dimiliki suatu sekolah. Daya tampung sekolah sangat dipengaruhi kemampuan sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana yang mempengaruhi daya tampung sebuah sekolah antara lain :

1. Luas Lahan (area sekolah)
2. Banyaknya Ruang Kelas
3. Jumlah Tenaga Pengajar
4. Banyaknya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang lain seperti meja kursi yang tersedia di tiap kelas.

Sedangkan dalam penelitian ini, faktor yang dipakai adalah jumlah banyaknya ruang kelas dan dikaitkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur jumlah maksimal siswa yang ditampung dalam suatu kelas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, pembangunan sarana pendidikan juga mempunyai ketentuan yang ditetapkan. Berikut merupakan standar sarana prasarana pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016.

TABEL II. 2
Kriteria Penentuan Rombongan Belajar dan Daya Tampung Fasilitas Pendidikan

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik per Rombongan belajar
1	SD/MI	6-24	28
2	SMP/MTs	3-33	32
3	SMA/MA	3-36	36
4	SMK	3-72	36
5	SDLB	6	5
6	SMPLB	3	8
7	SMALB	3	8

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016

Berdasarkan kriteria penentuan jumlah rombongan belajar dan daya tampung fasilitas pendidikan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan jenjang SMP/MTs adalah 3-33 rombongan belajar dengan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar adalah 32 peserta didik. Ketersediaan kapasitas daya tampung sangat penting untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah yang dapat tertampung serta jumlah penduduk menurut usia sekolah yang tidak dapat tertampung pada sekolah yang sudah ada. Besaran penduduk usia sekolah yang dapat tertampung dan tidak tertampung dapat menjadi acuan dalam penentuan kemampuan daya tampung sekolah. Jadi, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan daya tampung sebuah sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan kapasitas daya tampung
2. Jumlah penduduk usia sekolah yang dapat tertampung dalam sekolah
3. Jumlah penduduk usia sekolah yang tidak tertampung dalam sekolah

2.5 Jangkauan pelayanan Sarana Pendidikan

Jangkauan pelayanan adalah jarak terjauh yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk menuju lokasi suatu pusat pelayanan. Jangkauan digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelayanan tersebut digunakan untuk melayani daerah di sekitarnya. Jangkauan pelayanan suatu fasilitas dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas akan mempengaruhi potensi suatu wilayah sebagai daya tarik, dimana dengan keberadaan tingkat aksesibilitasnya yang dipengaruhi oleh jarak, ketersediaan sarana dan prasarana penghubung akan memberikan kemudahan dalam mencapai suatu lokasi bagi para pelakunya (Tarigan, 2005). Christaller juga turut menegaskan bahwa konsep utama pencapaian konsumen untuk memperoleh pelayanan adalah jarak tempuh. Max Weber memberi pandangan lain terkait teori lokasi yaitu transportasi adalah faktor utama yang mempengaruhi teori lokasi yang menguntungkan adalah yang berada pada lahan dengan ketersediaan fasilitas pendukung. Selain itu, Petter E. Liyoyd menjelaskan bahwa setiap fasilitas memiliki jangkauan yang disebut range dan terdapat batas minimal dari luas fasilitas yang di namakan threshold dengan tujuan agar produsen bisa tetap bertahan hidup (berproduksi). Pasar yang dimaksud dalam kajian teori ini dapat di analogikan untuk penentuan lokasi fasilitas sosial diantaranya fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Berdasarkan beberapa teori diatas, terdapat persamaan yaitu lokasi fasilitas pendidikan dipengaruhi oleh aksesibilitas berupa jarak dan jangkauan pelayanan. Selain itu biaya transportasi dan kesesuaian lahan yang tepat mempengaruhi keuntungan suatu lokasi. Lokasi pendidikan juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana penghubung. Penelitian ini fokus pada optimalisasi persebaran fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan guna untuk memenuhi kebutuhan wilayah untuk memperoleh pelayanan publik. Oleh karena itu, dengan melihat pada permasalahan yang ada di wilayah studi, indikator yang diperoleh adalah terdapat faktor aksesibilitas berupa jarak tempuh, jangkauan pelayanan dan tersedianya sarana penghubung untuk mencapai lokasi pelayanan publik.

Lokasi fasilitas sekolah diharapkan dalam suatu kondisi yang baik dan optimal. Lokasi optimal yang dimaksud adalah lokasi terbaik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dalam penentuan lokasi sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek dengan tujuan lokasi sekolah berada pada lokasi optimal sehingga dalam pemanfaatannya akan lebih optimal, efektif dan efisien. Lokasi optimal fasilitas dapat dilihat dari terciptanya keseimbangan antara jumlah fasilitas dan jumlah penduduk yang dilayani dalam suatu area. Selain terkait dengan jumlah fasilitas, jarak maksimum jangkauan fasilitas yang mampu melayani penduduk berupa kedekatan jarak pencapaian dan fasilitas sarana penghubung juga memiliki peranan sebagai tolak ukur estimasi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk

mencapai lokasi fasilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, pembangunan sarana pendidikan juga mempunyai ketentuan yang ditetapkan terkait jarak maksimal fasilitas pendidikan SMP/MTs dimana satu kelompok permukiman terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Engelhardt (1978) dalam Henlita (2013), juga menjelaskan bahwa terdapat kriteria dalam memilih lokasi sekolah antara lain sebagai berikut .

TABEL II. 3
Kriteria Pemilihan Lokasi Sekolah

No.	Jenjang Pendidikan	Kriteria pemilihan Lokasi Sekolah (Aksesibilitas)
1	TK	Aksesibilitas dapat dicapai oleh pejalan kaki, sepeda, kendaraan
2	SD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas untuk masyarakat umum 2. Aksesibilitas dapat dicapai oleh pejalan kaki, sepeda, kendaraan, dan bis sekolah
3	SLTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas untuk masyarakat umum 2. Aksesibilitas dapat dicapai oleh pejalan kaki, sepeda, kendaraan, dan bis sekolah
4	SMU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas untuk masyarakat umum 2. Aksesibilitas dapat dicapai oleh pejalan kaki, sepeda, kendaraan, dan bis sekolah

Sumber : Engelhardt 1978 dalam Henlita 2013

Untuk sekolah jenjang SMP/MTs, yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi sekolah adalah pertimbangan aksesibilitas yang diperlukan dari permukiman. Standar yang mengatur lokasi fasilitas pendidikan sebagai bentuk dari perencanaan perumahan di Lingkungan Perkotaan adalah SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan Lingkungan Perkotaan. Sesuai standar yang ada, fasilitas pendidikan juga memperhatikan radius area layanan. Hal ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan pencapaian keberadaan fasilitas pendidikan yang telah ada dimana radius jangkauan sarana pendidikan SMP/MTs adalah 1.000 meter. Untuk mengetahui area pelayanan sarana dapat dianalisis menggunakan network analysis service area. Network analisis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan saling terhubung. Network analisis secara umum adalah permodelan transportasi makroskopis untuk melihat hubungan antar obyek yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Service Area Analysis adalah metode untuk memperhitungkan area cakupan dari suatu obyek (jangkauan). Pada dasarnya network analisis akan membentuk deliniasi suatu area dengan rute dan jarak tempuh, dimana dalam arcview akan bergantung pada unsur data berupa garis sehingga fungsi analisis network yang berlaku adalah yang bertipe polyline atau line. Dalam penelitian ini jaringan yang digunakan berupa jaringan jalan.